

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan, "Metode Penelitian Hukum." *Rineka Cipta*, Jakarta, 2013
- Friedman, Lawrence M., "Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, terjemahan M. Khozim," *Bandung: Nusa Media*, 2009, 1975
- Garner, Bryan A., "Black Law Dictionary," 8th Edition, *West Publishing Co.*, USA, 2004
- Hasan, Iqbal, "Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya." *Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2002
- Kusumaatmadja, Mochtar, "Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional," *Bandung: Binacipta*, 1976
- Mardiasmo, "Perpajakan Edisi Revisi." *Yogyakarta: Andi*, Yogyakarta, 2011
- Moleong, Lexy, "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Remaja Rosdakarya*, Bandung, 2002
- Muhammad, Abdulkadir, "Hukum dan Penelitian Hukum." *Citra Aditya Abadi*, Bandung, 2004
- R. A., Musgrave, Musgrave, P. B., "Public Finance in Theory and Practice." 5th Edition, *McGraw-Hill*, USA, 1989
- Rakhmindyarto, "Insentif Pajak dan Ketahanan Fiskal pada Masa Pandemi Covid-19." *Gramedia Pustaka Utama*, Jakarta, 2021
- Sigrid, Helmes, & Goto, K, "Tax Incentives for the Creative Industries." *Springer*, Singapore, 2017
- Soekanto, Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum." *Universitas Indonesia (UI Press)*, Jakarta, 2014

-----, dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.” *PT. Rajawali Pers*, Jakarta, 2001

Soemitro, Rochmat, “Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan.” *Bandung: Graha Ilmu*, 2012

Sudjana, Nana, dan Ibrahim, “Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.” *Sinar Baru*, Bandung, 1989

Sunggono, Bambang, “Metodologi Penelitian Hukum.” *Rajawali Pers*, Bandung, 2008

Winardi, “Kamus Ekonomi,” *Mandar Maju*, Bandung, 2011

B. Karya Ilmiah

Aminah, Titik, “Rekonstruksi Regulasi Peralihan Harta Bersama Berupa Tanah Objek Warisan Melalui Jual Beli Berbasis Nilai Keadilan,” (*Doctoral Diss., Universitas Islam Sultan Agung, 2024*)

Ansori, Lutfi, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Yuridis Vol. 4, No. 2*, 2007

Barkatullah, Abdul Halim, “Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum” *Jurnal UKSW Banjarmasin Universitas Lambung Mangkurat*, 2013

Basir, Abdul, “Pengaruh Budaya Hukum terhadap Peningkatan Kesadaran Membayar Pajak.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 No. 5*, 2022

- Carrillo, Jo., "Links and Choices: Popular Legal Culture in the Work of Lawrence M. Friedman," *Southern California Interdisciplinary Law Journal* 17, 2007
- Daeli, Nisayangin Mariana, "Pengaruh Pertumbuhan Cacing Sutra terhadap Perbedaan Pakan Limbah Organik dan Pakan Fermentasi," *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan*, Vol. 02, No. 02, Agustus 2025.
- Dewi, Dyah Adriantini Sintha, "Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan dalam Konsep Negara Kesejahteraan," *Jurnal Yustisia UNS*. Vol. 5 No. 1, April 2016.
- Graetz, Michael J. dan Louis L. Wilde, "The Economics of Tax Compliance: Fact and Fantasy," *National Tax Journal*, Vol. 38 No. 3, 1985.
- Holland, David, dan Richard J. Vann, "Income Tax Incentives for Investment." *Tax Law Design and Drafting*, Vol. 2, 1998
- Kautsar, Izzy Al, Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital," *Jurnal Sapientia*, Vol. 7 No 2, 2022
- Makmur, Syafruddin, "Budaya Hukum dalam Masyarakat Multikultural," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol.II No. 2, 2015
- Mirow, M. C., "Leon Duguit," *Fiu Legal Studies Research Paper Series*, 2018
- Noor, Safrina, A Soehartono, A A Savitri, "'Menjaga Marwah' Insentif Perpajakan yang Berdampak pada Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019." *Jurnal Riset Terapan Akuntansi (1)*, 2020
- Nurita, Riski Febria, Laga Sugiarto, "'Membangun Budaya Hukum Indonesia di Era Globalisasi.'" *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, No. 1, 2018

OECD, “Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2025,” OECD Publishing, Paris, 2025.

Santoso, Andolini, dan Tanudjaja, “Kendala Kepatuhan Membayar Pajak dalam Perspektif KUHP Baru.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 No. 8, 2024

Smits, Jan. M., “Law Making in the European Union: On Globalization and Contract Law in Divergent Legal Cultures,” *Louisiana Law Review* 67, No. 4, 2007

Umamah, Reza, Nesya Zuhrah, Heikelindra Kurniawan, dan Wirawan Firman Nurcahya, “Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia.” *Journal of Macroeconomics and Social Development* 1, No. 4, 2024

Yunus, Nur Rohim, “Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia dalam Dimensi Hukum Progresif.” *Supremasi Hukum*, Vol, 11 No. 1, 2015

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2025 tentang Piagam Wajib Pajak (*Taxpayers' Charter*)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2017 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2014 tentang Tata Cara

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2015 tentang Tata Cara

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2013 tentang Tata Cara

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk

Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2015 tentang Tata Cara

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk

Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020

tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktora Jenderal Pajak

Surat Edaran Nomor Se-44/PJ/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian

Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

D. Sumber-Sumber dari Internet

Benny S. Tabalujan, “Perkembangan Hukum di Negara Berkembang Peran

Budaya Hukum,”

<http://studihukum.wordpress.com/2009/10/22/perkembangan-hukum-di-negara%20berkembang-peran-budaya-hukum/>

BPK Jatim, *BPK Temukan Penerimaan Pajak Masih Bocor,*

[jatim.bpk.go.id/dari-media/bpk-temukan-penerimaan-pajak-masih-](http://jatim.bpk.go.id/dari-media/bpk-temukan-penerimaan-pajak-masih-bocor/#:~:text=Kedua%2C%20DJP%20kurang%20menetapkan%20Pajak,Ini%20terdiri%20atas%20dua%20hal)

[bocor/#:~:text=Kedua%2C%20DJP%20kurang%20menetapkan%20Pajak,Ini%20terdiri%20atas%20dua%20hal](http://jatim.bpk.go.id/dari-media/bpk-temukan-penerimaan-pajak-masih-bocor/#:~:text=Kedua%2C%20DJP%20kurang%20menetapkan%20Pajak,Ini%20terdiri%20atas%20dua%20hal)

BPK Jatim, *Temuan BPK atas PBB Migas yang Belum Dipungut (59 KKKS),*

[jatim.bpk.go.id/dari-media/menkeu-kurang-cermat-audit-pajak-migas-](http://jatim.bpk.go.id/dari-media/menkeu-kurang-cermat-audit-pajak-migas-telat/#:~:text=Dari%20uji%20terbatas%20terhadap%20rekapitulasi,PBB%20migas%202013%20dan%202014.)

[telat/#:~:text=Dari%20uji%20terbatas%20terhadap%20rekapitulasi,PBB%20migas%202013%20dan%202014.](http://jatim.bpk.go.id/dari-media/menkeu-kurang-cermat-audit-pajak-migas-telat/#:~:text=Dari%20uji%20terbatas%20terhadap%20rekapitulasi,PBB%20migas%202013%20dan%202014.)

DDTCNews, *Update 2024: Apa Itu Pajak Pusat dan Pajak Daerah,*

news.ddtc.co.id/literasi/kamus/1800205/update-2024-apa-itu-pajak-pusat-dan-pajak-daerah

DJP, *Siaran Pers Nomor SP-42/2023 tentang Pemerintah Sempurnakan Aturan*

Pengurangan PBB, pajak.go.id/sites/default/files/2023-12/SP-42%202023%20Pemerintah%20Sempurnakan%20Aturan%20Pengurangan%20PBB.pdf

Eko Priyono, *Inovasi dalam Substansi Hukum Penagihan Pajak,*

[pajak.go.id/id/artikel/inovasi-dalam-substansi-hukum-penagihan-](http://pajak.go.id/id/artikel/inovasi-dalam-substansi-hukum-penagihan-pajak/#:~:text=Menurut%20Lawrence%20M,di%20pemerintahan%20legislatif%20dan%20eksekutif)

[pajak/#:~:text=Menurut%20Lawrence%20M,di%20pemerintahan%20legislatif%20dan%20eksekutif](http://pajak.go.id/id/artikel/inovasi-dalam-substansi-hukum-penagihan-pajak/#:~:text=Menurut%20Lawrence%20M,di%20pemerintahan%20legislatif%20dan%20eksekutif)

IKPI, *Pengusaha Perkebunan hingga Pertambangan Bebas Pungutan PBB, Ini*

Syaratnya!, [ikpi.or.id/en/pengusaha-perkebunan-hingga-pertambangan-bebas-pungutan-pbb-ini-](http://ikpi.or.id/en/pengusaha-perkebunan-hingga-pertambangan-bebas-pungutan-pbb-ini)

[syaratnya/#:~:text=Pengusaha%20di%20sektor%20tertentu%20yang,Wajib Pajak](#)

Ilham Fariduz Zaman, *Pandangan Lawrence M. Friedman Tentang 3*

Komponen Dalam Sistem Hukum, [pinterhukum.or.id/pandangan-lawrence-m-fiedman-tentang-3-komponen-dalam-sistem-](http://pinterhukum.or.id/pandangan-lawrence-m-friedman-tentang-3-komponen-dalam-sistem-hukum/#:~:text=Adapun%20struktur%20hukum%20sebagai%20ujung,tetapi%20juga%20moral%20yang%20memadai)

[hukum/#:~:text=Adapun%20struktur%20hukum%20sebagai%20ujung,tetapi%20juga%20moral%20yang%20memadai](#)

Komalesari, Lale Mandali Deneq Mas, “Perubahan Kebijakan Pajak:

Dampaknya terhadap Kepatuhan, Penghindaran, dan Perekonomian,”

pajakku.com, [https://artikel.pajakku.com/perubahan-kebijakan-pajak-dampaknya-terhadap-kepatuhan-penghindaran-dan-](https://artikel.pajakku.com/perubahan-kebijakan-pajak-dampaknya-terhadap-kepatuhan-penghindaran-dan-perekonomian/#:~:text=Jika%20tarif%20pajak%20meningkat%20secara,insentif%20untuk%20menghindari%20pajak%20berkurang)

[perekonomian/#:~:text=Jika%20tarif%20pajak%20meningkat%20secara,insentif%20untuk%20menghindari%20pajak%20berkurang](#)

PAJAK.COM, *Ketentuan Terbaru Fasilitas Pengurangan PBB-P5L*,

[pajak.com/pajak/ketentuan-terbaru-fasilitas-pengurangan-pbb-](http://pajak.com/pajak/ketentuan-terbaru-fasilitas-pengurangan-pbb-p5l/#:~:text=Kementerian%20Keuangan%20mengemukakan%2C%20fasilitas%20pengurangan,%2C%20seperti%20pandemi%20COVID%2D19)

[p5l/#:~:text=Kementerian%20Keuangan%20mengemukakan%2C%20fasilitas%20pengurangan,%2C%20seperti%20pandemi%20COVID%2D19](#)

Rahman, M. Abdul, “Kepatuhan Pajak di Indonesia: Sebuah Tinjauan

Teoritis,” ikpi.id, [https://ikpi.or.id/en/kepatuhan-pajak-di-indonesia-sebuah-tinjauan-](https://ikpi.or.id/en/kepatuhan-pajak-di-indonesia-sebuah-tinjauan)

